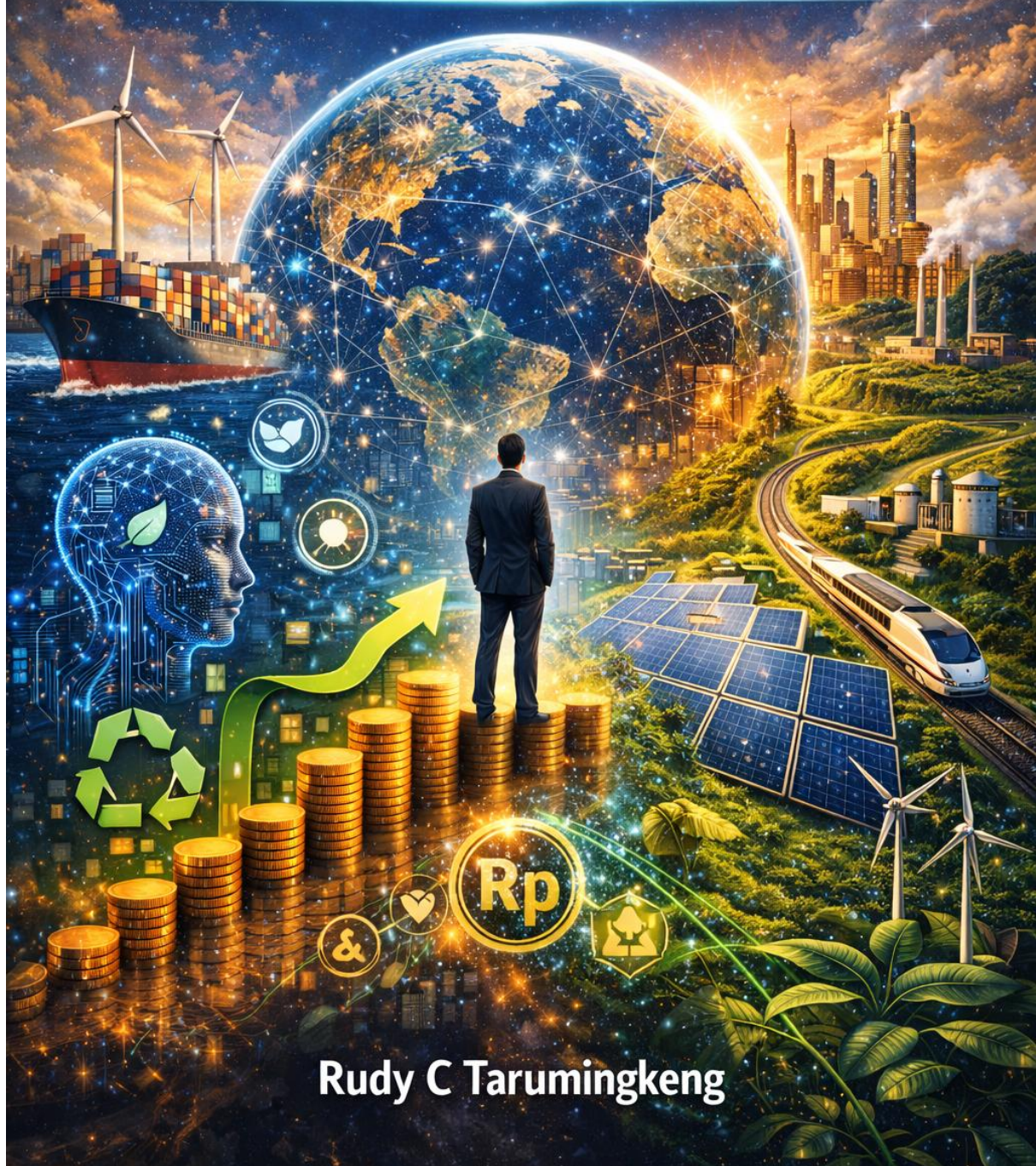


Globalisasi dan Ekonomi Masa Depan Berkelanjutan



Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

3 April 2026

GLOBALISASI DAN EKONOMI MASA DEPAN BERKELANJUTAN

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara globalisasi dan ekonomi masa depan berkelanjutan dalam konteks perubahan besar pada struktur ekonomi dunia. Globalisasi tidak sedang berhenti, tetapi sedang berubah bentuk. Jika pada fase sebelumnya globalisasi terutama bertumpu pada perdagangan barang, relokasi manufaktur, dan liberalisasi modal, maka fase mutakhir semakin ditentukan oleh jasa, data, standar, platform digital, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027, sedangkan WTO mencatat bahwa nilai ekspor perdagangan barang dunia mencapai US\$26,26 triliun pada 2025 dan perdagangan jasa mencapai US\$9,56 triliun. Pergeseran ini menunjukkan bahwa ekonomi global tetap terhubung, tetapi sumber nilai tambah dan sumber daya saingnya sedang berubah. ([IMF](#))

Makalah ini berargumen bahwa ekonomi masa depan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya dengan mengejar pertumbuhan PDB, investasi, atau ekspor dalam pengertian konvensional. Ia harus dibangun di atas integrasi antara produktivitas, inovasi, transisi energi, kualitas institusi, pengelolaan data, dan keadilan sosial. IEA menunjukkan bahwa investasi energi global diperkirakan mencapai US\$3,3 triliun pada 2025, dengan

sekitar US\$2,2 triliun mengalir ke energi terbarukan, nuklir, jaringan, penyimpanan, elektrifikasi, dan efisiensi, dua kali lipat dari investasi pada minyak, gas, dan batu bara. Pada saat yang sama, World Bank memperingatkan bahwa laju pengurangan kemiskinan global melambat tajam dan sekitar 622 juta orang diproyeksikan masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030. Dengan demikian, isu keberlanjutan ekonomi masa depan selalu mencakup dimensi ekologis dan sosial sekaligus. ([IEA](#))

Makalah ini juga menegaskan bahwa globalisasi baru memunculkan paradoks: ia membuka peluang pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar, tetapi juga berpotensi memperdalam ketimpangan, konsentrasi pasar, dan ketergantungan teknologi. UNCTAD menilai ekonomi digital diperkirakan tumbuh 10–12% per tahun dan menghasilkan lebih dari dua pertiga nilai tambah baru dalam dekade mendatang, namun investasi digital sangat terkonsentrasi. World Bank menunjukkan bahwa hampir 90% perdagangan dunia kini dipengaruhi oleh *nontariff measures* yang sebagian besar berkaitan dengan standar. Karena itu, masa depan ekonomi berkelanjutan tidak cukup didekati dengan konsep “pertumbuhan hijau” atau “transformasi digital” secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai proses penataan ulang hubungan antara globalisasi, inovasi, daya saing, kedaulatan kebijakan, dan distribusi manfaat pembangunan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Kata Kunci

globalisasi, ekonomi berkelanjutan, ekonomi masa depan, transisi energi, perdagangan digital, data, kecerdasan buatan, daya saing

Globalisasi dan Ekonomi Masa Depan Berkelanjutan

Pendahuluan

Istilah “ekonomi masa depan berkelanjutan” semakin penting ketika dunia menghadapi tiga tekanan sekaligus. Tekanan pertama adalah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Tekanan kedua adalah percepatan transformasi digital, khususnya AI, data, dan jasa digital. Tekanan ketiga adalah tuntutan untuk menurunkan emisi, memperkuat ketahanan iklim, dan menjaga agar pertumbuhan tidak memperdalam kemiskinan maupun ketimpangan. IMF menggambarkan ekonomi global 2026 sebagai tetap bertahan di tengah kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, sedangkan UNCTAD memproyeksikan pertumbuhan global hanya sekitar 2,6% dan menekankan bahwa negara berkembang menghadapi tekanan dari perlambatan mitra dagang utama, meningkatnya proteksionisme, serta kebutuhan mendesak untuk membangun diversifikasi dan resiliensi. ([IMF](#))

Dalam situasi seperti itu, globalisasi tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai perluasan pasar lintas batas. OECD menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah apa yang diperdagangkan, bagaimana perdagangan berlangsung, dan siapa yang dapat ikut serta. WTO pun menunjukkan bahwa selain perdagangan barang yang tetap besar, jasa dan jasa yang disampaikan secara digital kini menjadi bagian kunci dari ekonomi dunia. Akibatnya, ekonomi masa depan tidak dapat dibaca hanya melalui logika manufaktur, komoditas, dan pelabuhan, tetapi juga melalui logika cloud, pusat data, interoperabilitas, standardisasi, serta tata kelola arus data lintas batas. ([OECD](#))

Keberlanjutan kemudian menjadi kata kunci yang tidak boleh dipersempit menjadi isu lingkungan semata. World Bank dalam *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024* secara eksplisit menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran bersama harus dicapai tanpa

menimbulkan biaya yang tidak dapat diterima bagi planet. Ini berarti keberlanjutan adalah konsep yang memadukan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan batas ekologis. Jika salah satu dimensi diabaikan, maka ekonomi masa depan akan kehilangan legitimasi dan daya tahannya.

([World Bank](#))

Makalah ini bertolak dari asumsi bahwa globalisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan bukanlah tiga agenda yang berdiri sendiri. Ketiganya saling membentuk. Globalisasi baru membawa peluang besar bagi penyebaran teknologi, investasi, dan pembelajaran. Tetapi globalisasi juga memperbesar risiko konsentrasi manfaat bila tidak dibarengi kebijakan yang tepat. Teknologi dan data dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperbesar kesenjangan bila akses, keterampilan, dan regulasi timpang. Sementara itu, keberlanjutan memerlukan investasi besar pada energi, infrastruktur, keterampilan, dan institusi yang tidak mungkin dibangun di luar arus global. Karena itu, pertanyaan utama makalah ini adalah: bagaimana globalisasi dapat diarahkan untuk menopang ekonomi masa depan yang produktif, hijau, dan inklusif, alih-alih sekadar lebih cepat tetapi lebih rapuh. ([IEA](#))

Globalisasi Baru dan Perubahan Struktur Ekonomi Dunia

Globalisasi baru ditandai oleh pergeseran dari dominasi barang menuju kombinasi barang, jasa, data, dan platform. WTO melaporkan bahwa perdagangan jasa mencapai US\$9,56 triliun pada 2025, sedangkan total perdagangan barang dan jasa mencapai US\$34,65 triliun. Jasa yang disampaikan secara digital tumbuh sangat cepat dan menjadi bagian penting dari perdagangan internasional. Artinya, globalisasi saat ini tidak berhenti pada arus fisik, tetapi merambah arus yang tidak berwujud: software, lisensi, cloud services, transaksi digital, konsultasi, dan layanan profesional lain yang berjalan melalui jaringan. ([World Trade Organization](#))

UNCTAD menilai bahwa perdagangan dunia pada 2026 sedang dibentuk ulang oleh perlambatan pertumbuhan, naiknya proteksionisme, dan

perubahan struktural pada rantai nilai, jasa, serta regulasi. Penekanan pada "structural shifts" sangat penting. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan saat ini bukan siklus biasa, melainkan pergeseran arsitektur ekonomi. Jika pada globalisasi lama perusahaan terutama mencari lokasi termurah, maka pada globalisasi baru perusahaan juga mempertimbangkan ketahanan rantai pasok, keamanan teknologi, akses terhadap data, kepastian kebijakan, dan kompatibilitas standar. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

OECD menegaskan bahwa digital trade menurunkan biaya partisipasi dalam perdagangan internasional dan memperluas siapa yang dapat ikut serta. Ini berarti globalisasi baru membuka kesempatan bagi pelaku yang sebelumnya kurang terhubung, termasuk perusahaan kecil, profesional independen, dan institusi pendidikan atau layanan. Namun, OECD juga menekankan bahwa digital trade memunculkan tantangan regulasi baru yang membuat pemerintah lebih sulit memastikan manfaatnya dibagi secara inklusif. Dengan kata lain, globalisasi baru memperluas peluang, tetapi tidak otomatis memperluas distribusi manfaat. ([OECD](#))

Perubahan struktural ini membawa implikasi besar bagi ekonomi masa depan berkelanjutan. Bila sumber daya saing lama bertumpu pada biaya tenaga kerja murah, skala produksi, dan ekspor manufaktur, maka sumber daya saing baru semakin bertumpu pada kualitas jasa, penguasaan data, kemampuan inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas standardisasi. World Bank bahkan menegaskan bahwa hampir 90% perdagangan dunia kini dipengaruhi oleh *nontariff measures* yang sebagian besar terkait standar. Ini berarti pertumbuhan masa depan tidak lagi dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang mutu regulasi dan kualitas infrastruktur institusional. ([World Bank](#))

Keberlanjutan sebagai Reorientasi Tujuan Ekonomi

Dalam ekonomi klasik, keberhasilan sering diukur terutama melalui pertumbuhan output. Pendekatan tersebut menghasilkan kemajuan besar,

tetapi juga meninggalkan sejumlah persoalan: kemiskinan yang tetap luas, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan emisi gas rumah kaca. World Bank melalui *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024* menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan global melambat tajam dan bahwa sekitar 3,4 miliar orang masih hidup di bawah garis US\$6,85 per hari. Fakta ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi global belum otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan yang cukup luas. ([World Bank](#))

Karena itu, keberlanjutan harus dipahami sebagai reorientasi tujuan ekonomi, bukan sebagai koreksi kecil. Tujuan ekonomi masa depan tidak hanya memperbesar nilai tambah, tetapi juga memastikan bahwa nilai tambah itu lahir dengan penggunaan energi dan material yang lebih efisien, distribusi manfaat yang lebih adil, serta ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan iklim dan geopolitik. IEA menunjukkan bahwa investasi energi global pada 2025 cenderung semakin condong ke energi rendah emisi, penyimpanan, jaringan, dan efisiensi. Pergeseran investasi ini merupakan indikator penting bahwa keberlanjutan mulai masuk ke jantung keputusan ekonomi, bukan sekadar menjadi wacana etis. ([IEA](#))

UNCTAD dalam *Digital Economy Report 2024* juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital memiliki jejak lingkungan yang semakin besar. Pengiriman smartphone telah meningkat drastis sejak 2010, perangkat IoT diproyeksikan melonjak tajam, dan pertumbuhan ini membawa tekanan yang makin besar terhadap penggunaan bahan mentah, energi, air, serta limbah elektronik. Artinya, digitalisasi pada dirinya sendiri tidak otomatis berkelanjutan. Ekonomi masa depan yang didorong AI, cloud, dan data center tetap membutuhkan penataan energi, infrastruktur, dan material yang lebih cermat. ([UN Trade and Development](#)) ([UNCTAD](#))

Dengan demikian, ekonomi masa depan berkelanjutan menuntut perubahan ukuran keberhasilan. Negara dan perusahaan tidak cukup bertanya "seberapa besar pertumbuhan?" tetapi juga "pertumbuhan

seperti apa, untuk siapa, dan dengan konsekuensi ekologis seperti apa?" Di titik inilah globalisasi dan keberlanjutan bertemu: keterhubungan global membuka arus teknologi dan investasi untuk transisi, tetapi juga memperbesar tekanan konsumsi, produksi, dan eksploitasi sumber daya bila tidak diatur dengan baik. ([Open Knowledge Hub](#))

Peran Data, AI, dan Jasa Digital

Data kini menjadi salah satu aset paling strategis dalam ekonomi global. OECD menegaskan bahwa arus data lintas batas menopang operasi bisnis internasional, rantai pasok, komunikasi, dan perdagangan digital. Ketika data dapat mengalir dengan aman dan terpercaya, perusahaan mampu mengoptimalkan logistik, mempercepat pembayaran, memprediksi permintaan, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini membuat data berfungsi sebagai input ekonomi sekaligus infrastruktur. ([World Bank](#))

WTO dan OECD menunjukkan bahwa tata kelola data memiliki konsekuensi ekonomi makro. Pendekatan data yang terlalu tertutup dapat menurunkan pertumbuhan dan perdagangan, sedangkan pendekatan yang memungkinkan arus data dengan safeguards menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar. Ini menunjukkan bahwa ekonomi masa depan yang berkelanjutan memerlukan *data governance* yang seimbang: cukup terbuka untuk mendorong inovasi dan perdagangan, tetapi cukup kuat untuk melindungi privasi, keamanan, dan kepercayaan publik. ([World Bank](#))

AI mempercepat dinamika tersebut. WTO menilai AI dapat menurunkan biaya perdagangan dan meningkatkan produktivitas, sementara World Bank menekankan bahwa fondasi AI yang efektif memerlukan empat unsur: *connectivity*, *compute*, *context*, dan *competency*. Dengan kata lain, AI tidak hanya soal algoritma, tetapi juga soal energi, chip, cloud, data, dan keterampilan. Maka, ekonomi masa depan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang utuh: membangun kapasitas komputasi tanpa mengabaikan sumber energi, membangun data ecosystem tanpa

mengabaikan governance, serta membangun adopsi AI tanpa mengabaikan kualitas SDM. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Jasa digital lalu menjadi kendaraan penting bagi penyebaran manfaat teknologi. WTO mencatat jasa digital sebagai bagian perdagangan yang terus tumbuh cepat, sedangkan OECD menilai bahwa digital trade mengubah apa yang diperdagangkan dan siapa yang bisa ikut serta. Ini berarti ekonomi masa depan berkelanjutan juga bergantung pada kemampuan memperluas jasa modern—pendidikan digital, layanan kesehatan digital, keuangan digital, logistik cerdas, dan layanan bisnis berbasis data—agar produktivitas meningkat bukan hanya di sektor teknologi, tetapi juga di masyarakat luas. ([World Trade Organization](#))

Transisi Energi dan Investasi Hijau

Salah satu indikator terkuat bahwa masa depan ekonomi sedang bergeser adalah pola investasi energi global. IEA menunjukkan bahwa total investasi energi global diperkirakan mencapai US\$3,3 triliun pada 2025. Dari jumlah itu, sekitar US\$2,2 triliun mengalir ke energi terbarukan, nuklir, jaringan, penyimpanan, bahan bakar rendah emisi, efisiensi, dan elektrifikasi, sedangkan sekitar US\$1,1 triliun mengalir ke minyak, gas, dan batu bara. Rasio dua banding satu ini menunjukkan bahwa arah modal global mulai bergerak kuat ke sistem energi rendah emisi. ([IEA](#))

IEA juga mencatat bahwa investasi pada tenaga surya diperkirakan mencapai sekitar US\$450 miliar pada 2025, menjadikannya pos tunggal terbesar dalam inventori investasi energi global. Investasi penyimpanan baterai juga melonjak pesat, melampaui US\$65 miliar. Angka-angka ini penting karena menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi hanya proyek normatif, tetapi semakin menjadi arena utama akumulasi modal, inovasi teknologi, dan pembentukan pasar baru. ([IEA](#))

Namun transisi energi tidak sepenuhnya mulus. IEA menekankan bahwa ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan konsentrasi rantai

pasok masih membentuk keputusan investasi energi. Ini berarti ekonomi masa depan berkelanjutan tidak hanya memerlukan lebih banyak investasi hijau, tetapi juga tata kelola global yang mampu menurunkan risiko, memperkuat infrastruktur jaringan, dan mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada segelintir pemasok teknologi dan mineral kritis. ([IEA](#))

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, transisi energi juga berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru. Ia menciptakan permintaan baru untuk peralatan, jaringan, penyimpanan, rekayasa, layanan, pelatihan, dan pembiayaan. Tetapi manfaat itu tidak akan terdistribusi otomatis. Negara yang mampu membangun ekosistem industri, jasa, dan keterampilan di sekitar transisi energi akan memperoleh manfaat lebih besar daripada negara yang hanya menjadi pasar akhir teknologi hijau. Di sini, hubungan antara globalisasi dan keberlanjutan menjadi sangat nyata: keterhubungan global membuka akses ke teknologi, tetapi hasil akhirnya sangat bergantung pada kapasitas domestik menyerap dan mengembangkannya. ([IEA](#))

Standar, Daya Saing, dan Keberlanjutan

World Development Report 2025 dari World Bank memberikan kontribusi penting dengan menempatkan standar sebagai “hidden infrastructure” ekonomi modern. Hampir 90% perdagangan dunia kini dipengaruhi oleh *nontariff measures*, banyak di antaranya terkait label, pengujian keselamatan, kompatibilitas, dan berbagai spesifikasi teknis. Dalam ekonomi masa depan berkelanjutan, standar bukan hanya alat teknis; standar adalah perangkat yang menentukan siapa yang dapat masuk ke pasar, siapa yang dipercaya, dan siapa yang mampu berkembang ke rantai nilai yang lebih tinggi. ([World Bank](#))

Kaitan standar dengan keberlanjutan semakin kuat. Dari sistem pembayaran digital hingga stasiun pengisian kendaraan listrik, standar memungkinkan teknologi baru memberi manfaat pada skala ekonomi yang luas. Tanpa standar, teknologi hijau atau digital dapat tumbuh, tetapi akan

terfragmentasi, mahal, dan sulit didifusikan. Karena itu, ekonomi masa depan berkelanjutan membutuhkan bukan hanya inovasi, tetapi juga standarisasi yang memadai agar inovasi bisa diadopsi secara luas dan aman. ([World Bank](#))

World Bank juga mengajukan kerangka *adapt-align-author*. Negara berpendapatan rendah dan menengah pada tahap awal perlu menyesuaikan standar internasional dengan kebutuhan lokal, lalu menyelaraskan pasar domestik dengan standar global, dan pada tahap lebih maju ikut menulis standar internasional di bidang prioritas. Kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi masa depan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga soal kemampuan membentuk aturan. Negara yang hanya menjadi penerima standar akan selalu reaktif; negara yang ikut membentuk standar memiliki peluang lebih besar mengubah globalisasi menjadi keunggulan nasional. ([World Bank](#))

Dengan demikian, daya saing berkelanjutan harus dipahami sebagai kombinasi antara produktivitas, inovasi, dan kualitas institusi. Negara atau perusahaan yang hijau tetapi tidak efisien akan sulit bertahan. Yang efisien tetapi tidak memenuhi standar lingkungan atau sosial juga akan kehilangan akses pada pasar masa depan. Justru pada titik temu antara efisiensi, standar, dan keberlanjutan itulah daya saing abad ke-21 sedang dibentuk. ([World Bank](#))

Pasar Kerja, Iklim, dan Keadilan Sosial

World Bank dalam *Jobs in a Changing Climate* menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kehilangan setara 43 juta pekerjaan pada 2050 di 49 negara, dan jika diekstrapolasi ke seluruh negara berpendapatan rendah dan menengah, setara dengan 260 juta pekerjaan. Namun laporan yang sama menunjukkan bahwa investasi adaptasi dapat menciptakan atau melindungi sekitar 150 juta pekerjaan. Data ini menegaskan bahwa iklim bukan masalah tambahan di luar

ekonomi, tetapi langsung menyentuh pekerjaan, pendapatan, dan struktur kesempatan. ([World Bank](#))

WEF memperkirakan sampai 2030 akan ada 170 juta pekerjaan baru dan 92 juta pekerjaan tergeser, sedangkan ILO menunjukkan satu dari empat pekerjaan di dunia memiliki beberapa derajat paparan terhadap GenAI. Kedua temuan ini bila dibaca bersama menunjukkan bahwa dunia kerja akan berubah karena dua arus besar sekaligus: transisi digital dan transisi iklim. Artinya, ekonomi masa depan berkelanjutan harus menyiapkan tenaga kerja untuk dua perubahan sekaligus, bukan hanya salah satunya. ([OECD](#))

Masalahnya kemudian adalah distribusi. Transisi yang tidak dikelola akan cenderung lebih menguntungkan kelompok pekerja yang sudah memiliki pendidikan lebih tinggi, akses teknologi lebih baik, dan kemampuan beradaptasi lebih besar. Sebaliknya, pekerja rutin, pekerja informal, wilayah pinggiran, dan kelompok rentan berisiko tertinggal. Inilah sebabnya keberlanjutan ekonomi masa depan selalu mengandung persoalan keadilan sosial. Ekonomi hijau dan digital yang tumbuh cepat, tetapi membiarkan terlalu banyak orang tertinggal, akan kehilangan dukungan politik dan sosialnya sendiri. ([World Bank](#))

Oleh karena itu, reskilling, upskilling, perlindungan transisi, dan perluasan akses ke infrastruktur digital harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tenaga kerja tidak boleh hanya reaktif atau kompensatif. Ia harus membantu pekerja berpindah ke pekerjaan baru, memperoleh sertifikasi yang relevan, dan mengakses peluang baru di ekonomi digital dan hijau. Dengan cara itu, pertumbuhan berkelanjutan tidak hanya menjadi agenda lingkungan, tetapi juga agenda mobilitas sosial. ([World Bank](#))

Risiko Ketimpangan dan Konsentrasi

Salah satu paradoks besar dalam globalisasi baru adalah bahwa ia menurunkan sebagian biaya partisipasi, tetapi sekaligus memperbesar konsentrasi manfaat. OECD menekankan bahwa digital transformation reduces the costs of participating in international trade, reshaping what we trade, how we trade, and who can take part. Namun OECD juga mengingatkan bahwa tantangan regulasi baru membuat lebih sulit memastikan manfaat perdagangan digital dibagi secara inklusif. Hal ini berarti keterbukaan digital dapat menjadi inklusif secara potensi, tetapi eksklusif secara hasil. ([OECD](#))

UNCTAD menunjukkan gambaran yang lebih tegas. Investasi digital terkonsentrasi pada sedikit negara dan sedikit perusahaan, sedangkan digital markets themselves semakin terkonsentrasi sehingga banyak pemerintah harus meningkatkan intervensi persaingan. Ini berarti globalisasi digital dapat membentuk pasar yang tampak lebih terbuka, tetapi secara substantif lebih dikuasai oleh segelintir pemain. Dalam ekonomi seperti ini, pihak yang menguasai data, cloud, platform, dan standard-setting memperoleh keuntungan berlipat, sementara pihak lain hanya menjadi pengguna layanan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ketimpangan semacam ini juga berpotensi terjadi pada tingkat negara. Negara yang lebih cepat membangun infrastruktur digital, komputasi, kualitas institusi, dan talenta akan lebih mudah menarik investasi dan membangun inovasi. Negara yang lebih lambat justru dapat semakin tertinggal, meskipun sama-sama terhubung ke internet dan pasar global. Karena itu, globalisasi baru mengandung bahaya "ketimpangan kemampuan", bukan hanya ketimpangan pendapatan. Negara dan kelompok yang tidak memiliki kapasitas menyerap arus global akan berada pada posisi yang semakin lemah. ([World Bank](#))

Dari perspektif keberlanjutan, risiko konsentrasi ini penting karena ekonomi berkelanjutan membutuhkan legitimasi sosial. Bila manfaat digitalisasi dan transisi hijau hanya terkonsentrasi pada sedikit kelompok

atau wilayah, maka resistensi terhadap kebijakan iklim, standardisasi, bahkan inovasi teknologi sendiri akan meningkat. Itu sebabnya agenda pemerataan, perlindungan sosial, persaingan sehat, dan quality infrastructure harus dibaca sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, bukan sebagai agenda yang berdiri di luar ekonomi. ([World Bank](#))

Negara, Tata Kelola, dan Kedaulatan Ekonomi

Dalam dunia yang semakin digital dan berstandar, negara justru menjadi semakin penting. *OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026* menegaskan bahwa transformasi digital memiliki efek yang luas dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu pada seluruh ekonomi. Ini berarti negara tidak bisa lagi bekerja dalam silo sempit. Pendidikan, data governance, layanan, perdagangan, inovasi, energi, dan ketahanan sosial harus ditautkan ke dalam strategi yang lebih menyeluruh. ([OECD](#))

Kedaulatan ekonomi di era globalisasi baru karenanya tidak berarti menutup diri. Kedaulatan ekonomi berarti kemampuan memilih posisi yang cerdas dalam jaringan global yang saling bergantung. Negara yang berdaulat secara ekonomi bukan negara yang terisolasi, tetapi negara yang bisa menggunakan keterhubungan global untuk memperkuat kapasitas domestik, bukan sekadar menjadi pengguna pasif teknologi, standar, dan pasar yang ditetapkan orang lain. World Bank menekankan hal ini melalui pentingnya *adapt-align-author* dalam standardisasi. ([World Bank](#))

Pada saat yang sama, UNCTAD menekankan bahwa negara berkembang perlu strategi investasi digital yang lebih aktif, termasuk infrastruktur, keterampilan, penguatan *local innovation ecosystems*, dan tata kelola data serta AI. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi masa depan sangat berkaitan dengan kapabilitas institusional. Tanpa negara yang mampu mengorkestrasi pendidikan, layanan, investasi, standardisasi, dan inovasi, globalisasi baru hanya akan memperkuat ketergantungan lama dalam bentuk yang lebih canggih. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Dengan demikian, hubungan antara globalisasi dan kedaulatan ekonomi seharusnya tidak dibaca sebagai oposisi biner. Yang dibutuhkan adalah negara yang cukup terbuka untuk belajar, cukup kuat untuk mengatur, dan cukup cakap untuk membangun kapasitas jangka panjang. Dalam ekonomi masa depan berkelanjutan, kualitas negara bukan lagi sekadar soal stabilitas politik atau administrasi, tetapi soal kemampuan menjadi arsitek dari transformasi digital, hijau, dan sosial secara simultan. ([OECD](#))

Implikasi bagi Negara Berkembang

Bagi negara berkembang, globalisasi baru menghadirkan kesempatan yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Peluangnya adalah bahwa jalur pertumbuhan tidak harus lagi sepenuhnya mengikuti industrialisasi manufaktur klasik. Jasa digital, pendidikan daring, fintech, software, ekonomi kreatif, dan layanan profesional lintas batas membuka ruang pertumbuhan baru. OECD menekankan bahwa transformasi digital mengubah siapa yang bisa ikut serta dalam perdagangan internasional. Ini berarti aktor yang sebelumnya berada di pinggir pasar global dapat memiliki peluang lebih besar. ([OECD](#))

Namun, hambatannya juga sangat besar. UNCTAD menunjukkan bahwa arus investasi digital sangat terkonsentrasi, sedangkan World Bank menekankan bahwa low- and middle-income countries menghadapi tantangan besar dalam membangun fondasi AI secara luas. Maka, negara berkembang berisiko mengalami apa yang dapat disebut sebagai "keterhubungan tanpa kapabilitas": mereka terkoneksi secara digital, tetapi tidak membangun nilai tambah yang cukup. Keadaan seperti ini akan membuat mereka menjadi pasar besar, bukan pusat penciptaan nilai. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Strategi yang lebih masuk akal bagi negara berkembang adalah mengubah keterbukaan menjadi pembelajaran. Ini berarti menautkan perdagangan digital dengan reformasi jasa, investasi dengan transfer kemampuan, standar dengan pembangunan quality infrastructure, dan teknologi

dengan ekosistem inovasi lokal. Negara berkembang tidak harus meniru seluruh struktur teknologi negara maju, tetapi perlu memilih lapisan yang relevan untuk dikuasai secara strategis. Di sinilah globalisasi baru dapat diubah menjadi sarana pembangunan, bukan sekadar arus yang membentuk dari luar. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Pada akhirnya, keberhasilan negara berkembang akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun fondasi domestik yang kuat. Fondasi itu meliputi infrastruktur digital, energi yang andal, keterampilan, standardisasi, tata kelola data, dan kapasitas fiskal serta regulatif untuk membiayai transisi. Tanpa fondasi ini, ekonomi masa depan berkelanjutan akan tetap menjadi slogan yang indah tetapi sulit diwujudkan secara material. ([World Bank](#))

Agenda Kebijakan untuk Ekonomi Masa Depan Berkelanjutan

Agenda kebijakan pertama adalah memperlakukan keberlanjutan sebagai strategi produktivitas, bukan beban. Investasi energi bersih, efisiensi, dan elektrifikasi harus dipahami sebagai pondasi daya saing masa depan. IEA menunjukkan arus modal yang semakin kuat ke energi rendah emisi, yang berarti ekonomi yang lebih siap pada transisi energi berpotensi lebih kompetitif dalam jangka panjang. Negara yang tertinggal dalam investasi semacam ini akan menghadapi biaya energi, biaya karbon, dan biaya ketergantungan teknologi yang lebih tinggi. ([IEA](#))

Agenda kedua adalah reformasi jasa dan tata kelola data. OECD memperingatkan bahwa hambatan jasa yang tetap tinggi akan menghalangi produktivitas dan penciptaan nilai pada fase pertumbuhan yang didorong AI. Sementara itu, kebijakan data yang terlalu tertutup atau terlalu longgar sama-sama merugikan. Karena itu, reformasi jasa, interoperabilitas, keamanan siber, perlindungan data, dan *data free flow with trust* harus dilihat sebagai bagian inti dari strategi ekonomi, bukan isu teknis pinggiran. ([OECD](#))

Agenda ketiga adalah penguatan standardisasi dan quality infrastructure. World Bank menegaskan bahwa negara perlu berinvestasi pada pengujian, sertifikasi, metrologi, dan akreditasi agar standar dapat bekerja sebagai pendorong pembangunan, bukan sekadar penghalang masuk. Dalam ekonomi masa depan, kemampuan memenuhi standar hijau, digital, dan keselamatan akan menentukan akses ke pasar dan investasi. Negara yang mengabaikan quality infrastructure akan kalah bukan karena tidak punya produk, tetapi karena tidak punya legitimasi teknis. ([World Bank](#))

Agenda keempat adalah investasi besar pada manusia. WEF dan ILO menunjukkan bahwa pekerjaan akan berubah besar-besaran, tetapi transformasi itu tidak harus berarti kehilangan massal bila reskilling, upskilling, dan perlindungan transisi tersedia. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan harus diperlakukan sebagai infrastruktur ekonomi. Negara yang menunda investasi pada manusia akan menemukan bahwa teknologi tersedia, tetapi produktivitas tidak bergerak cukup luas. ([World Bank](#))

Agenda kelima adalah membangun negara yang lebih strategis dan lebih terpadu. OECD menekankan *whole-of-economy approach*, sementara World Bank menekankan *adapt-align-author*. Kedua kerangka ini pada dasarnya berkata hal yang sama: kebijakan ekonomi masa depan tidak bisa dikelola secara terpisah-pisah. Energi, industri, data, keterampilan, perdagangan, dan keberlanjutan harus dipadukan dalam satu kerangka pembangunan yang koheren. Negara yang mampu melakukan orkestrasi ini akan lebih siap menavigasi globalisasi baru secara produktif. ([OECD](#))

Kesimpulan

Globalisasi dan ekonomi masa depan berkelanjutan tidak dapat dipahami sebagai dua tema yang berdiri sendiri. Globalisasi baru sedang mengubah struktur ekonomi dunia melalui jasa, data, AI, platform, dan standar. Pada saat yang sama, keberlanjutan memaksa dunia menilai ulang cara ekonomi tumbuh, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan apa konsekuensi

ekologis serta sosialnya. IMF, WTO, UNCTAD, OECD, World Bank, dan IEA secara bersama-sama menunjukkan bahwa ekonomi masa depan akan semakin digital, semakin berstandar, dan semakin dituntut untuk lebih rendah emisi serta lebih inklusif. ([IMF](#))

Namun arah itu tidak otomatis menghasilkan kemajuan yang adil. Teknologi dan data dapat memperbesar produktivitas, tetapi juga memperbesar konsentrasi. Transisi hijau dapat membuka investasi baru, tetapi juga menimbulkan risiko ketimpangan baru bila keterampilan dan infrastruktur sosial tertinggal. Globalisasi dapat menyebarkan peluang, tetapi juga menyebarkan ketergantungan bila negara hanya menjadi pasar. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan apakah ekonomi masa depan akan lebih hijau atau lebih digital, melainkan apakah ia akan lebih mampu menghubungkan keterbukaan dengan kapasitas, inovasi dengan pemerataan, dan keberlanjutan dengan kesejahteraan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Masa depan ekonomi yang berkelanjutan pada akhirnya menuntut keseimbangan yang sulit tetapi perlu. Keterbukaan harus dijaga agar pembelajaran dan inovasi terus mengalir. Inovasi harus didorong agar produktivitas meningkat dan transisi energi berjalan. Kedaulatan kebijakan harus diperkuat agar negara mampu mengubah keterhubungan global menjadi kemampuan domestik. Negara dan masyarakat yang berhasil membangun keseimbangan inilah yang paling mungkin tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar maju dalam ekonomi abad ke-21. ([World Bank](#))

Glosarium

Globalisasi baru adalah fase globalisasi yang semakin ditentukan oleh jasa, data, standar, platform digital, dan pertimbangan ketahanan, bukan hanya perdagangan barang dan liberalisasi modal. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ekonomi masa depan berkelanjutan adalah perekonomian yang mengejar pertumbuhan, inovasi, dan produktivitas tanpa menimbulkan biaya sosial dan ekologis yang tidak dapat diterima. ([World Bank](#))

Arus data lintas batas adalah perpindahan data antarnegara yang menopang perdagangan digital, operasi bisnis global, rantai pasok, dan layanan lintas yurisdiksi. ([World Bank](#))

Data free flow with trust (DFFT) adalah pendekatan tata kelola yang mendorong arus data lintas batas sambil menjaga perlindungan, keamanan, dan kepercayaan. ([World Bank](#))

AI (Artificial Intelligence) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputasi melakukan analisis, prediksi, klasifikasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. ([World Bank](#))

AI-enabling goods adalah barang fisik yang menopang pengembangan dan penggunaan AI, seperti chip, semikonduktor, server, dan perangkat transmisi data. ([World Trade Organization](#))

Quality infrastructure adalah sistem pengujian, akreditasi, sertifikasi, dan metrologi yang memungkinkan standar diterapkan secara efektif. ([World Bank](#))

Transisi energi adalah pergeseran sistem energi dari dominasi bahan bakar fosil menuju sistem rendah emisi yang lebih banyak bertumpu pada energi terbarukan, efisiensi, jaringan, dan penyimpanan. ([IEA](#))

Reskilling adalah pelatihan ulang untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan perubahan teknologi, iklim, dan struktur pasar kerja. ([World Bank](#))

Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk mengelola keterhubungan global agar memperkuat kapasitas domestik dan tidak terjebak dalam ketergantungan pasif. ([World Bank](#))

Referensi (APA 7)

International Energy Agency. (2025). *World energy investment 2025*. IEA.

International Labour Organization. (2025). *Generative AI and jobs: A 2025 update*. ILO.

International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook update, January 2026: Global economy—Steady amid divergent forces*. IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Cross-border data flows*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Digital trade*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026, March 13). *Services trade restrictions stayed high in 2025: Why removing hidden hurdles matters*. OECD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital economy report 2024*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *World investment report 2025: International investment in the digital economy*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2026). *Global trade update (January 2026): Top trends redefining global trade in 2026*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2026). *International investment in the digital economy: A toolkit for policymakers*. UNCTAD.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Bank. (2025). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations*. World Bank.

World Bank. (2025). *Jobs in a changing climate: Insights from World Bank Group country climate and development reports covering 93 economies*. World Bank.

World Bank. (2025). *World development report 2025: Standards for development*. World Bank.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics, March 2026*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 2 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69cdc32d-d5b0-83a0-ae1d-b7874e2a6389>